



PERATURAN
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG KELAS
JABATAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan struktur organisasi dan perubahan kelas jabatan di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu melakukan penyesuaian kelas jabatan di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa penyesuaian kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapat persetujuan penetapan kelas jabatan berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1224/M.SM.02.00/2023 perihal Persetujuan Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada tanggal 9 November 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);

2. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 19);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 748);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

Pasal I

Lampiran I Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 748), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Pasal II

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 2024

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA,

⌚

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ⌚

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

⌚

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR ⌚

LAMPIRAN I
PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG KELAS
JABATAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

**DAFTAR KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

A. KELAS JABATAN UNTUK JABATAN PIMPINAN TINGGI

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>
1.	Kepala LKPP	
2.	Sekretaris Utama	17
3.	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	15
4.	Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia	15
5.	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum	15
6.	Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan	17
7.	Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	15
8.	Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus	15
9.	Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional	15
10.	Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital	17
11.	Direktur Perencanaan Transformasi, Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan	15
12.	Direktur Sistem Pengadaan Digital	15
13.	Direktur Pasar Digital Pengadaan	15
14.	Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia	17
15.	Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan	15
16.	Direktur Sertifikasi Profesi	15
17.	Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa	17
18.	Direktur Advokasi Pemerintah Pusat	15

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
19.	Direktur Advokasi Pemerintah Daerah	15
20.	Direktur Penanganan Permasalahan Hukum	15
21.	Kepala Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa	15
22.	Kepala Pusat Data dan Informasi	15
23.	Inspektur	15

B. KELAS JABATAN UNTUK JABATAN ADMINISTRASI

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
(1)	(2)	(3)
Jabatan Administrator		
1.	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan Barang Milik Negara	12
2.	Kepala Bagian Rumah Tangga dan Protokol	12
3.	Kepala Bagian Tata Usaha	12
Jabatan Pengawas		
1.	Kepala Subbagian Rumah Tangga	9
2.	Kepala Subbagian Protokol	9
3.	Kepala Subbagian Tata Usaha I	9
4.	Kepala Subbagian Tata Usaha II	9
5.	Kepala Subbagian Tata Usaha	9
Jabatan Pelaksana		
1.	Analisis Akreditasi Lembaga Diklat	7
2.	Analisis Barang Milik Negara	7
3.	Analisis Berkas Sengketa	7
4.	Analisis Data dan Informasi	7
5.	Analisis Diklat	7
6.	Analisis Hukum	7
7.	Analisis Iklim Usaha dan Kerjasama	7
8.	Analisis Kerjasama Bilateral dan Regional	7
9.	Analisis Kerjasama Diklat	7
10.	Analisis Kinerja	7
11.	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	7

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
12.	Analisis Pengembangan Kompetensi	7
13.	Analisis Perencanaan	7
14.	Analisis Perencanaan Anggaran	7
15.	Analisis Perencanaan dan Kerjasama	7
16.	Analisis Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur	7
17.	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	7
18.	Analisis Permasalahan Hukum	7
19.	Analisis Protokol	7
20.	Analisis Satuan Pengawas Internal	7
21.	Analisis Sistem Informasi	7
22.	Analisis Tata Usaha	7
23.	Bendahara	7
24.	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	7
25.	Penelaah Pengembangan Usaha	7
26.	Perancang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	7
27.	Penyusun Laporan Keuangan	7
28.	Pengelola Rumah Tangga	6
29.	Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik	6
30.	Ajudan	6
31.	Pengadministrasian Sertifikasi	6
32.	Pengadministrasian Umum	6
33.	Pengelola Barang Milik Negara	6
34.	Pengelola Data Administrasi dan Verifikasi	6
35.	Pengelola Data Monitoring dan Evaluasi Berkas Sengketa	6
36.	Pengelola Keuangan	6
37.	Pengelola Media Center dan Kemitraan Media	6
38.	Pengelola Sertifikasi	6
39.	Pengelola Situs atau Web	6
40.	Pengelola Teknologi Informasi	6
41.	Pranata Barang dan Jasa	6
42.	Sekretaris	6

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
43.	Pengelola Penyelenggaraan Diklat	6
44.	Verifikator Anggaran	6
45.	Verifikator Keuangan	6
46.	Pengadministrasi Keuangan	5
47.	Pengadministrasi Layanan Pengadaan secara Elektronik	5

C. KELAS JABATAN UNTUK JABATAN FUNGSIONAL

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>
1.	Analisis Data Ilmiah Ahli Madya	11
2.	Analisis Data Ilmiah Ahli Muda	9
3.	Analisis Data Ilmiah Ahli Pertama	8
4.	Analisis Hukum Ahli Madya	11
5.	Analisis Hukum Ahli Muda	9
6.	Analisis Hukum Ahli Pertama	8
7.	Analisis Kebijakan Ahli Utama	14
8.	Analisis Kebijakan Ahli Madya	12
9.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	10
10.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8
11.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	12
12.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	10
13.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	8
14.	Analisis Pengembangan Kompetensi Ahli Madya	12
15.	Analisis Pengembangan Kompetensi Ahli Muda	10
16.	Analisis Pengembangan Kompetensi Ahli Pertama	8
17.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya	12
18.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	10
19.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	8
20.	Arsiparis Ahli Madya	11
21.	Arsiparis Ahli Muda	9
22.	Arsiparis Ahli Pertama	8

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
23.	Arsiparis Penyelia	8
24.	Arsiparis Pelaksana Lanjutan/Mahir	7
25.	Arsiparis Pelaksana/Terampil	6
26.	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Utama	14
27.	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya	12
28.	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	10
29.	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	8
30.	Auditor Ahli Utama	14
31.	Auditor Ahli Madya	12
32.	Auditor Ahli Muda	10
33.	Auditor Ahli Pertama	8
34.	Auditor Penyelia	9
35.	Auditor Mahir	7
36.	Auditor Terampil	6
37.	Manggala Informatika Ahli Madya	12
38.	Manggala Informatika Ahli Muda	10
39.	Manggala Informatika Ahli Pertama	8
40.	Penata Laksana Barang Penyelia	9
41.	Penata Laksana Barang Mahir	8
42.	Penata Laksana Barang Terampil	7
43.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya	12
44.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	10
45.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	8
46.	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya	12
47.	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda	10
48.	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama	8
49.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya	12
50.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	10
51.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	8
52.	Perekayasa Ahli Madya	12
53.	Perekayasa Ahli Muda	9

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
54.	Perekayasa Ahli Pertama	8
55.	Perencana Ahli Madya	12
56.	Perencana Ahli Muda	10
57.	Perencana Ahli Pertama	8
58.	Pranata Hubungan Masyarakat Madya	11
59.	Pranata Hubungan Masyarakat Muda	9
60.	Pranata Hubungan Masyarakat Pertama	8
61.	Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia	8
62.	Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Lanjutan	7
63.	Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana	6
64.	Pranata Keuangan APBN Penyelia	9
65.	Pranata Keuangan APBN Mahir	8
66.	Pranata Keuangan APBN Terampil	7
67.	Pranata Komputer Ahli Utama	13
68.	Pranata Komputer Ahli Madya	11
69.	Pranata Komputer Ahli Muda	9
70.	Pranata Komputer Ahli Pertama	8
71.	Pranata Komputer Penyelia	8
72.	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan/Mahir	7
73.	Pranata Komputer Pelaksana/Terampil	6
74.	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	5
75.	Pustakawan Ahli Muda	9
76.	Pustakawan Ahli Pertama	8
77.	Sandiman Ahli Madya	12
78.	Sandiman Ahli Muda	10
79.	Sandiman Ahli Pertama	8
80.	Statistisi Ahli Madya	11
81.	Statistisi Ahli Muda	9
82.	Statistisi Ahli Pertama	8
83.	Widyaiswara Ahli Utama	14
84.	Widyaiswara Ahli Madya	12

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
85.	Widyaiswara Ahli Muda	10
86.	Widyaiswara Ahli Pertama	8

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HENDRAR PRIHADI